

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Laporan keuangan merupakan elemen penting dalam akuntansi sektor BUMN maupun swasta untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku (Utami & Sulardi, 2019). Laporan keuangan perusahaan berfungsi sebagai sumber informasi utama bagi pemangku kepentingan untuk menilai posisi keuangan, kinerja, serta prospek usaha di masa depan. Hal ini disebabkan penilaian kinerja keuangan perusahaan akan sulit dilakukan jika menggunakan laporan lain yang memiliki cakupan dan tujuan berbeda (Payne & Jensen, 2002). Agar informasi yang disajikan relevan dan andal, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang meliputi relevansi, keandalan, keterbandingan, dan dapat dipahami. Kriteria utama yang menjadi tolok ukur evaluasi laporan keuangan di sektor BUMN maupun swasta antara lain adalah ketepatan waktu, keandalan, dan keterbandingan (Iyoha, 2012).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai akuntabilitas dan transparansi entitas, khususnya pada sektor publik seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketepatan pelaporan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga berdampak pada pengambilan keputusan strategis oleh para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Sebagai entitas yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai pelaku usaha dan agen pembangunan negara, keterlambatan pelaporan dapat mengganggu kepercayaan publik serta mengurangi kontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui dividen (Peraturan Menteri BUMN No. PER-5/MBU/04/2021).

Tabel 1.1
Keterlambatan Pelaporan Keuangan BUMN (2021–2023)

No	Nama perusahaan	Tahun terlambat	Keterangan
1.	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	2022, 2023	Terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan kepada BEI dan OJK; proses audit memerlukan klarifikasi tambahan; perusahaan dikenakan sanksi administratif oleh BEI
2.	PT Indofarma Tbk	2023	Belum menyampaikan laporan keuangan auditan kepada OJK dan publik; keterlambatan terkait masalah kesinambungan usaha dan koreksi audit
3.	PT Kimia Farma Tbk	2023	Belum menyampaikan laporan keuangan auditan kepada OJK dan BEI; membutuhkan penyesuaian pencatatan keuangan serta proses review auditor eksternal
4.	PT Waskita Beton Precast Tbk	2022	Mengajukan perpanjangan waktu penyampaian laporan keuangan kepada OJK dan BEI; alasan: proses audit belum selesai dan restrukturisasi keuangan
5.	PT Waskita Karya Tbk	2022	Laporan keuangan tahun 2022 masih dalam proses audit dan verifikasi internal; penyampaian kepada OJK dan BEI ditunda karena kebutuhan validasi tambahan
6.	PT Danareksa	2023	Terlambat menyampaikan laporan

	(Persero)		keuangan auditan kepada Kementerian BUMN dan OJK; keterlambatan terkait konsolidasi laporan keuangan entitas anak
7.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2023	Terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan kepada Kementerian BUMN dan OJK; penyebab: penyesuaian aset dan rekonsiliasi data keuangan
8.	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	2023	Terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan kepada Kementerian BUMN dan OJK; keterlambatan terkait proses evaluasi portofolio aset dan verifikasi auditor
9.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2023	Terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan kepada Kementerian BUMN dan OJK; disebabkan kompleksitas konsolidasi laporan keuangan unit dan anak usaha di seluruh wilayah operasional

Sumber : Sinta, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sembilan perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan dalam proses pelaporan, yang mencerminkan lemahnya pengendalian internal, proses audit yang kurang optimal, serta kendala dalam penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu. Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas perusahaan.

Setelah pandemi COVID-19 yang berlangsung hingga tahun 2020, banyak BUMN menghadapi tekanan finansial yang berdampak pada struktur biaya, laba, dan kinerja operasional. Oleh karena itu, periode 2021–2023

menjadi krusial untuk mengamati bagaimana BUMN merespons tekanan tersebut, terutama terkait kepatuhan terhadap audit dan pelaporan keuangan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK tahun 2021–2023, masih ditemukan kelemahan signifikan dalam sistem pengendalian internal dan ketidaksesuaian pelaporan keuangan pada sejumlah BUMN.

Temuan audit adalah hal yang ditemukan mengenai ketidakwajaran yang ada pada lsporsn keuangan terhadap pelanggaran Undang-Undang dan pengendalian internal yang berlaku (Azahari & Sulardi, 2021). Temuan audit yang disampaikan oleh BPK mencerminkan adanya permasalahan atau kelemahan dalam sistem dan prosedur keuangan BUMN. Namun, keberadaan temuan audit saja belum cukup untuk memperbaiki tata kelola keuangan, jika tidak disertai tindak lanjut yang serius oleh manajemen. Penelitian Rachmawati (2016) menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Azahari dan Sulardi (2021) yang menyatakan bahwa semakin banyak temuan audit, maka semakin tinggi kemungkinan laporan keuangan disampaikan tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan karena temuan audit mencerminkan kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap regulasi, atau kesalahan penyajian laporan keuangan yang membutuhkan klarifikasi dan koreksi. Proses perbaikan tersebut memerlukan waktu tambahan, yang pada akhirnya menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.

Tindak lanjut atas rekomendasi audit atau *follow-up on audit recommendations* menjadi indikator penting dalam menilai tingkat komitmen dan kepatuhan entitas terhadap perbaikan yang disarankan auditor (Saputra & Lestari, 2020). Menurut Kurniawan & Sari (2022), efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelaporan dan akuntabilitas keuangan entitas publik. Sedangkan Sari et al (2015) yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dimana penelitiannya menyatakan bahwa semakin banyak rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi akan

meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Fatikasari (2024) menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit BPK tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan tindak lanjut dilakukan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, bukan karena adanya komitmen substansial terhadap peningkatan kualitas informasi keuangan, sehingga dampaknya terhadap kualitas laporan menjadi tidak signifikan.

Dalam konteks pelaporan keuangan, tidak semua entitas merespons temuan audit dengan kecepatan dan ketepatan yang sama. Opini audit yang dikeluarkan auditor berperan sebagai sinyal penting. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencerminkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, sedangkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Tidak Wajar menunjukkan bahwa masih terdapat masalah material yang belum terselesaikan. Opini ini dapat memperkuat atau melemahkan dampak dari tindak lanjut rekomendasi audit terhadap ketepatan pelaporan keuangan (Puspita & Pratiwi, 2021). Opini audit berfungsi sebagai sinyal kualitas laporan keuangan, di mana opini WTP menunjukkan bahwa laporan telah disusun secara andal, sementara opini selain WTP menunjukkan masih adanya kelemahan material. Opini audit dapat memoderasi hubungan antara tindak lanjut rekomendasi audit dan ketepatan penyampaian laporan keuangan. Jika opini yang diterima buruk, entitas cenderung lebih cepat menindaklanjuti rekomendasi untuk memperbaiki citra dan menghindari opini serupa di periode berikutnya. Sebaliknya, opini yang baik bisa menurunkan urgensi tindak lanjut, karena manajemen merasa telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan auditor.

Tabel 1.2 Research Gap

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Furqan et al. (2020)	<i>The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia</i>	Tidak langsung diuji terhadap ketepatan waktu; di sektor publik, ditemukan pengaruh

		negatif terhadap kualitas laporan keuangan Di sektor publik, tindak lanjut rekomendasi audit memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
Indriani et al. (2024)	<i>The impact of audit findings and follow-up actions on audit recommendations on audit opinions of financial statements with APIP capabilities as a moderating variable (A study on provincial/regencies/cities governments in Suluttenggo Region)</i>	Tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit TLRHP (tindak lanjut rekomendasi audit) berpengaruh positif terhadap opini audit
Alma Yulia Putri Azahari Sulardi, 2021	Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, Dan Ukuran Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia	hubungan yang positif secara signifikan terhadap ketepatanwaktuan LKPD. Sementara variabel temuan audit dan ukuran daerah memiliki pengaruh negatif

		terhadap ketepatanwaktuan LKPD.
Aulia Dwi Lestari, Abdul Rohman, 2022	Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Melalui Kualitas Laporan Keuangan	Hasil studi menunjukkan bahwa Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit tidak secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kualitas pelayanan publik.
Rachmawati (2016)	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia	Hasil menemukan temuan audit berpengaruh negatif terhadap Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan
Fatikasari (2024)	Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022	Hasil menemukan tindak lanjut rekomendasi audit BPK tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber : Sinta,2025

Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengingat BUMN memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan swasta juga perlu diperhatikan. Menurut Ramadhani (2023), perbedaan ini mencakup orientasi tujuan, sistem pengendalian, serta hubungan dengan pemilik modal, yaitu pemerintah. Di sisi lain, BUMN juga memiliki insentif untuk melaporkan kinerja keuangan secara hati-hati karena jika tidak memperoleh laba, mereka tidak diwajibkan menyetor dividen ke negara. Hal ini dapat menimbulkan potensi *moral hazard*, terutama jika sistem pengawasan dan audit tidak dijalankan secara optimal

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap ketepatan penyampaian pelaporan keuangan pada BUMN, serta menguji opini audit sebagai variabel moderasi pada periode pasca-COVID-19 yaitu tahun 2021–2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan tata kelola BUMN dan pengambilan kebijakan berbasis audit di lingkungan perusahaan milik negara. Opini audit dipertimbangkan sebagai variabel moderasi karena opini tersebut merupakan bentuk penilaian independen dari auditor yang mencerminkan tingkat kepatuhan entitas terhadap standar pelaporan keuangan. Opini audit dapat memengaruhi persepsi dan reaksi manajemen terhadap urgensi tindak lanjut hasil audit. Jika opini yang diterima negatif (selain WTP), manajemen cenderung terdorong untuk segera memperbaiki temuan guna memperoleh opini yang lebih baik. Dengan demikian, opini audit berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan antara temuan audit dan ketepatan pelaporan, serta antara tindak lanjut rekomendasi audit dan ketepatan pelaporan.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian pelaporan keuangan perusahaan BUMN?

2. Apakah tindak lanjut atas rekomendasi audit berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian pelaporan keuangan perusahaan BUMN?
3. Apakah opini audit memoderasi pengaruh temuan audit terhadap ketepatan penyampaian pelaporan keuangan perusahaan BUMN?
4. Apakah opini audit memoderasi pengaruh tindak lanjut rekomendasi audit terhadap ketepatan penyampaian pelaporan keuangan perusahaan BUMN?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh temuan audit (temuan audit) terhadap ketepatan penyampaian pelaporan keuangan pada perusahaan BUMN.
2. Menganalisis pengaruh tindak lanjut atas rekomendasi audit terhadap ketepatan penyampaian pelaporan keuangan pada perusahaan BUMN.
3. Menganalisis peran opini audit sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara temuan audit dan ketepatan penyampaian pelaporan keuangan.
4. Menganalisis peran opini audit sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara tindak lanjut rekomendasi audit dan ketepatan penyampaian pelaporan keuangan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik, audit, dan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan internal, kualitas pelaporan keuangan, dan peran opini audit sebagai alat moderasi dalam hubungan antara temuan audit serta tindak lanjut rekomendasi audit terhadap ketepatan laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak terkait, antara lain:

a) Bagi Manajemen Perusahaan BUMN

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal serta budaya kepatuhan terhadap jadwal pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini juga dapat mendorong manajemen untuk menindaklanjuti temuan audit secara lebih cepat dan tepat, sehingga pelaporan keuangan menjadi lebih akurat, transparan, dan tepat waktu.

b) Bagi Aparat Pengawasan Intern (SPI) dan Auditor Eksternal

Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas rekomendasi audit, mekanisme monitoring tindak lanjut audit, serta koordinasi antara auditor internal dan eksternal. Dengan demikian, hasil audit tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan ketertiban kepatuhan regulasi.

c) Bagi Kementerian BUMN dan Pemerintah

Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan, pengawasan, serta pedoman standar pelaporan keuangan BUMN agar lebih akuntabel dan transparan. Penelitian ini juga membantu pemerintah dalam memperkuat tata kelola perusahaan negara (*state-owned governance*) dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BUMN.

d) Bagi Regulator Pasar Modal

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaporan keuangan BUMN, sehingga dapat menjadi masukan dalam penyusunan regulasi pelaporan, pemberian sanksi yang lebih efektif, serta peningkatan sistem pelaporan berbasis digital yang lebih efisien.

e) Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)

Penelitian ini memberi informasi bagi investor mengenai tingkat transparansi dan reliabilitas pelaporan keuangan BUMN, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan penilaian risiko.

D. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pengaruh temuan audit dan tindak lanjut atas rekomendasi audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan opini audit sebagai variabel moderasi. Periode penelitian ini dilakukan dalam kurun 3 tahun. Dalam kata lain, ruang lingkup penelitian ini sebatas pada rumusan masalah dari penelitian ini.

